

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi pemerintahan di tengah keterbukaan sudah menjadi kebutuhan di Indonesia. Hal ini menyebabkan tuntutan yang lebih kuat untuk aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek ini penting dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Inilah yang sering mendorong proses transisi dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut otonomi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang melimpahkan segala kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pengelolaan anggaran sektor publik dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liando (2017) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan kebutuhan dalam sistem pemerintah daerah masing-masing.

Selain pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah juga diberi wewenang untuk dapat menggali pendapatan daerah secara mandiri, mengalokasikan dana untuk pelayanan umum, serta wewenang untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat di capai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Makarimbon (2020) menyatakan bahwa saat ini untuk menunjang pembangunan di daerah dibutuhkan sumber-sumber pendapatan yang tidak sedikit antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dana transfer dari pemerintah pusat.

Kinerja keuangan suatu daerah dapat dinilai melalui tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh daerah. Hal ini sejalan dengan (Makarimbon, 2020) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah membuat pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandiriannya. PAD sering dianggap menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai keterkaitan daerah terhadap pusat. Pada dasarnya semakin banyak kontribusi PAD terhadap APBD menandakan semakin kecil keterkaitan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata dan bertanggung jawab. Namun masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah, sehingga hal ini menimbulkan pengaruh secara langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pebangunan. Pemerintah Daerah perlu mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya agar jalannya roda Pemerintahan yang mandiri dapat berjalan dengan lancar, Karena dari pengelolaan Sumber-sumber pendapatan yang ada hasilnya bagi Pemerintah Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan belanja daerah.

Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda untuk mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Masing-masing dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dimuat rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber-sumber pembiayaan, dimana sumber dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah itu sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan cara melihat potensi daerahnya dari sisi pendapatan dan pengeluaran maka dapat disusun kebijakan yang tepat, dengan berdasarkan kebijakan tersebut aktivitas Pemerintahan di Provinsi Riau dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka menyediakan pelayanan publik maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran atau belanja daerah. belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. pelaksanaan belanja daerah harus digunakan sesuai target dan anggaran yang ditetapkan.

Menurut Zebua (2014) bahwa belanja daerah teralokasi secara sistematis dan terstruktur ke pos-pos belanja untuk mendorong pertumbuhan pembangunan yang positif bagi masyarakat dan daerah untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Dalam pengelolaan kinerja tersebut belanja daerah sangat tergantung pada sumber pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan yang cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. disamping itu, belanja daerah juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah adalah alokasi belanja pada sektor tertentu belum sejalan dengan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau belanja daerah pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini

**Tabel 1.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau T.A 2016-2020 (Dalam Ribuan Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	Realisasi Belanja Daerah (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dumai	1.114,97	1.203,26	1.112,40	1.311,56	1.423,23
Kepulauan Meranti	1.023,13	969,29	1.042,03	1.206,58	1.112,51
Bengkalis	3.146,73	3.223,93	3.159,07	3.757,85	2.988,47
Indragiri Hulu	1.476,37	1.435,33	1.310,97	1.636,10	1.429,88
Indragiri Hilir	1.990,10	2.010,03	1.800,13	1.983,89	1.963,65
Pelalawan	1.639,13	1.434,66	1.279,03	1.520,51	1.654,09
Siak	1.686,81	1.630,36	1.705,94	2.087,44	2.097,09

Kabupaten/ Kota	Realisasi Belanja Daerah (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kampar	2.360,51	2.232,83	2.168,29	2.714,73	2.497,87
Rokan Hulu	1.396,52	1.435,33	1.580,18	1.731,04	1.522,58
Rokan Hilir	1.850,83	1.552,46	1.625,84	2.033,00	2.052,62
Pekanbaru	2.025,56	2.152,17	2.220,36	2.365,26	2.341,18
Kuantan Singingi	1.288,05	1.361,03	1.344,12	1.552,17	1.413,85

Sumber: Website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan tabel diatas, belanja daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2016-2020 terbesar terdapat pada Kabupaten Bengkalis dan belanja daerah terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti. Belanja daerah pada Kabupaten Bengkalis lebih banyak dikeluarkan untuk belanja langsung berupa belanja pegawai, dan belanja tidak langsung berupa belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik Kabupaten Bengkalis. Sedangkan belanja daerah terendah yang terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan karena pendapatan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih relatif rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada tingkat Kabupaten/Kota sisi pengeluaran sebagian besar belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota lebih banyak diserap untuk kebutuhan belanja langsung dibanding dengan kebutuhan belanja tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam struktur APBD, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belanja daerah menurut beberapa penelitian diantaranya Penelitian oleh Panjaitan (2021) yang meneliti di Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyatakan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian penelitian

menurut Liando (2017) yang meneliti di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memperoleh hasil PAD, DAK, DAU, dan DBH berpengaruh terhadap belanja daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menggabungkan beberapa variabel yang berpotensi mempengaruhi belanja daerah. variabel tersebut adalah PAD, DAU, DAK, dan DBH. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di pulau Sumatra yang memiliki banyak kekayaan alam seperti minyak dan gas alam, pertanian, dan perkebunan terutama kelapa sawit dan karet. Oleh karena itu dengan adanya sumber daya alam dan potensi daerah tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2016-2020?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti hanya memasukkan beberapa variabel yang dianggap perlu untuk diuji pengaruhnya terhadap belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan belanja daerah. Penelitian ini dilakukan pada Kota/Kabupaten di Provinsi Riau.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020;
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020;
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020;
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020;

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti  
Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020”
2. Bagi penerus  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teori dalam melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
3. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Melalui penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wewenang teoritis khususnya tentang masalah yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang “Pengaruh Pedapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020”

#### 4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai penerapan sistem perimbangan daerah yang tengah berjalan dan dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

#### **BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.



**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

